

BAB II
KEBIJAKAN POLITIK SAKOKU DI JEPANG
MASA PEMERINTAHAN TOKUGAWA

Politik *Sakoku* adalah kebijakan pemerintah Jepang untuk menutup negaranya dari bangsa asing, meski kenyataannya pada saat itu Jepang masih memiliki hubungan politik dengan negara – negara seperti China, Korea, Ryukyu, dan Belanda. Pemerintah Jepang saat menjalankan Politik *Sakoku* tersebut yaitu pemerintah Keshogunan Tokugawa yang memerintah dari 1603 sampai 1867 dan merupakan pemerintahan militer di Jepang ketiga setelah Kamakura dan Muromachi.

Latar belakang diberlakukannya kebijakan politik *Sakoku* di antaranya adalah bertujuan untuk mencegah masuknya agama Kristen ke Jepang, walaupun pada awal mula masuknya agama Kristen ke Jepang mendapat sambutan yang baik dari beberapa *Damyō*. *Damyō* adalah pemimpin dari suatu propinsi pada pemerintahan Kamakura, Muromachi dan Tokugawa yang disebut pemerintah *Bakufu*.

2.1 Pemerintah Bakufu

Pemerintah *bakufu* sebagai lawan dari pemerintah sipil di bawah *kaisar* di Kyoto dipimpin oleh seorang *shogun* dan berlangsung dari tahun 1192 hingga 1867. Istilah *bakufu* dapat disebut juga *keshogunan* untuk menunjuk Shogun Kamakura (1192 -1333), Shogun Muromachi (1336-1573), dan Shogun Tokugawa (1603-1867) (diadaptasi dari Jepang: An Illustrated Encyclopedia. Tokyo: Kodansha, 1993).

Rangkaian pemerintahan *bakufu/keshogunan* adalah sebagai berikut: Setelah pemerintahan Kamakura berakhir pada 1333, dalam waktu singkat pemerintahan sempat kembali kepada *kaisar* yaitu dari 1333 sampai 1336. Kemudian kembali pada pemerintahan *keshogunan* yang kedua yang dikenal

dengan *Keshogunan Muromachi* atau *Bakufu Muramachi* yang berlangsung selama lebih dari dua abad yaitu dari 1336 sampai 1573.

Sebelum berdirinya zaman keshogunan, pada akhir zaman Heian terjadi kekacauan di bidang politik dan tingkat kejahatan meningkat di daerah – daerah. Hal – hal ini terjadi karena tindakan menyingkirkan musuh - musuhnya yang dilakukan klan Fujiwara yang memegang kekuasaan pemerintahan pada saat itu, meskipun secara formal kekuasaan berada di tangan kaisar. Di daerah akibat tingginya jurang pemisah antara bangsawan pemilik tanah yang semakin kaya dengan para petani pengelola tanah yang semakin miskin. Kondisi itu menyebabkan lahirnya kelompok militer. Kelompok militer ini kebanyakan berasal dari petani yang dipersejatai dan diberi latihan fisik dan kemahiran bela diri. Kemudian kelompok – kelompok kecil ini masuk ke kelompok – kelompok yang lebih besar diantaranya keluarga Minamoto dan keluarga Taira.

Setelah peperangan yang terus terjadi antara keluarga Minamoto dengan keluarga Taira. Meskipun keluarga Taira sempat memenangkan peperangan dan menjadi bangsawan kerajaan dan sempat memimpin Jepang. Namun pada akhirnya peperangan itu dimenangkan oleh keluarga Minamoto Yoritomo. Keluarga Minamoto berbeda dengan keluarga Taira yang memusatkan pusat politiknya di istana Kyoto. Minamoto Yoritomo membuat markasnya berada di Kamakura yang kemudia dikenal dengan nama Kamakura Bakufu. Sejak itu juga pusat politik berpindah dari istana ke markas besar militer. Minamoto Yoritomo membuat struktur pemerintahan militer yang langsung berada bawah pengawasannya dengan pembantu – pembantu setia ditunjuknya. Pertentangan antara bakufu dengan pihak istana berlangsung terus - menerus dan akibatnya bakufu jatuh pada tahun 1333. Kejatuhan bakufu dipercepat oleh membelotnya dua orang komandan militer yang sangat berpengaruh, yaitu Ashikaga Takauji dan Nita Yoshisada yang memihak istana.

Setelah pemerintahan Kamakura Bakufu, Kaisar Godaigo sempat memimpin Jepang selama kurang dari dua tahun namun kelompok anti istana yang dipimpin oleh Ashikaga Takauji yang merupakan seorang pembelot

menyerang istana Kyoto. Istana akhirnya dapat diduduki oleh Ashikaga dan kekuasaan Godaigo berakhir pada 1336 lalu berganti menjadi pemerintahan bakufu kedua, yaitu Muromachi Bakufu yang namanya diambil dari markas militer di Kyoto. Muromachi Bakufu didirikan oleh Ashikaga Takauji. Zaman Muromachi berlangsung kurang lebih dua ratus tahun yang di bagi menjadi dua bagian besar yakni zaman permulaan dimana enam puluh tahun merupakan masa pertentangan Istana Utara dengan Istana Selatan. Ashikaga kemudian menyatukan istana selatan dan istana utara. Caranya dengan meyatukan para *Shugo Daimyo* (Pembesar Tuan Tanah Daerah) yang memiliki kekuatan di daerah – daerah. Setelah penyatuan istana utara dan selatan kemudian sisanya yang lebih kurang seratus tahun adalah masa peperangan – peperangan dan kekacauan seluruh negeri yang disebut Sengoku Jidai.

Walaupun penyatuan negara sebelumnya sudah di usahakan oleh Oda Nobunaga. Namun dalam usahanya Ia terbunuh oleh Akechi Mitsuhide yang merupakan pengikutnya sendiri pada tahun 1582 di kuil Honnoji. Usaha penyatuan Jepang kemudian diteruskan oleh panglima yang diorbitkan oleh Oda Nobunaga yaitu Toyotomi Hideyoshi . Usaha menyatukan Jepang kemudian berhasil. Pada 1590 Toyotomi Hideyoshi berhasil menaklukan para daimyo dari seluruh negeri. Toyotomi Hideyoshi meski telah menjadi pemenang dalam perang saudara tersebut, tetapi tidak serta merta dapat mendirikan *keshogunan* sebagaimana layaknya pemenang perang pada masa itu, karena pemerintahan *keshogunan* setelah Muromachi diperintah oleh Tokugawa Ieyasu. Pemerintahan Keshogunan Tokugawa Ieyasu disebut *keshogunan/bakufu* Edo atau pemerintahan Tokugawa.

2.2 Kebijakan Politik Masa Pemerintahan Tokugawa

Pada masa pemerintahan Keshogunan Tokugawa diberlakukan beberapa kebijakan, di antaranya kebijakan yang paling fenomenal pada pemerintah ini adalah *Shinokosho* dan Politik *Sakoku*.

2.2.1 Shinokosho

Shinokosho berasal dari kata *shi*, kependekan dari *bushi* yang berarti *samurai*, *no* kependekan dari *noomin* yang berarti petani, *ko* kependekan dari *kosakunin* yang berarti pengrajin, dan yang terakhir adalah *sho*, kependekan dari *shoonin* yang berarti pedagang (Wibowo Robi, 2017:hal 81 – 82). Kebijakan ini bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan *shogun* dan mencegah pertikaian antara *daimyo*. Prosentase perbandingan untuk setiap golongan masyarakat adalah sebanyak :

- Bushi = 6% dari jumlah penduduk
- Noomin = 80% dari jumlah penduduk
- Kosakunin = 10% dari jumlah penduduk dan sisanya 4% adalah keluarga *Tennou* dan kaum bangsawan.

Meskipun golongan *samurai* adalah salah satu golongan terkecil, namun dalam pemerintahan feodal merupakan golongan yang terkuat dan tertinggi dan dapat menguasai golongan lainnya. Namun golongan petani meskipun tingkatannya berada langsung di bawah golongan *samurai*, akan tetapi karena dibebankan pajak yang sangat tinggi, tingkat kehidupan mereka sangat susah dan paling rendah, Sedangkan golongan pengrajin serta pedagang menjadi buruh serta berdagang. Walaupun tingkat golongannya berada di bawah golongan petani akan tetapi karena para golongan ini tinggal di kota dan perekonomian perdagangan di kota bertumbuh pesat, sehingga kehidupan para pedagang serta pengrajin-pun menjadi semakin kaya dan kedudukannya menjadi semakin kuat.

2.2.2 Politik Sakoku

Sakoku (鎖国 *harfiah: negara terkunci / negara terrantai*) merupakan kebijakan yang mengatur bahwa orang asing dilarang masuk ke Jepang dan orang Jepang dilarang berhubungan dengan orang asing ataupun meninggalkan Jepang dengan ancaman hukuman mati bagi yang melanggarnya (Wikipedia, 2017)

2.2.3 Latar Belakang Kebijakan Politik *Sakoku*

Kebijakan Politik *Sakoku* dibuat selain karena kekhawatiran pemerintah Jepang akan adanya penyebaran agama Kristen di Jepang, juga karena kekhawatiran akan adanya *imperialisme* di Jepang. sebagaimana sudah di sebutkan pada bab sebelumnya bahwa penguasa Jepang berpikir bahawa misi pelayaran Eropa terutama Portugis ke Jepang adalah *Gold, Gospel, Glory* atau mencari kekayaan, penyebaran agama dan mencari kejayaan. Misi tersebut bukan hal yang tidak mungkin berujung pada tujuan *imperialisme*, apalagi kondisi di mana masyarakat Jepang saat itu terikat dalam sistem *feodalisme* yaitu sistem sosial atau politik yang memberikan kekuasaan yang besar kepada golongan bangsawan atau tuan tanah. Selain itu, masyarakat Jepang kurang mempunyai rasa memiliki akan tanah air Jepang, bahkan sebagian besar kebudayaan Jepang berasal dari negara lain terutama China. Pendek kata, Jepang pada saat itu belum sadar akan kejejangannya. Karena hal itulah, dikhawatirkan jika bangsa asing masuk ke Jepang, maka Jepang akan sangat cepat dikuasai. Dengan alasan itulah, pemerintah Jepang saat itu mengambil kebijakan untuk menutup negara agar masyarakat Jepang mempunyai kesempatan yang besar untuk memperbaiki pola pikir masyarakatnya.

Kekhawatiran Jepang akan adanya *imperialisme* dipelopori oleh tokoh penguasa Jepang pada Zaman Azuchi Momoyama yaitu Toyotomi Hideyoshi yang pada masa kepemimpinannya sudah mulai mencurigai adanya dominasi dari negara-negara Eropa. Terlebih lagi dengan adanya pemberontakan oleh orang-orang Kristen di Nagasaki dan penyerangan atas biara-biara dan kuil-kuil *Shinto* pada Pemberontakan Shimabara pada 1638, maka sikap penguasa Jepang berubah terhadap agama Kristen dengan memberlakukan larangan terhadap agama Kristen di Jepang. Pelarangan adanya agama Kristen di Jepang dilanjutkan dengan larangan bagi orang Jepang untuk meninggalkan Jepang dan yang berada diluar negeri pun dilarang kembali ke Jepang, serta pada akhirnya tepatnya pada 1639 melarang semua orang asing masuk ke Jepang

2.2.4 Kebijakan Politik *Sakoku*

Sebenarnya selama Jepang menjalankan kebijakan Politik *Sakoku*, hubungan antara Jepang dengan negara-negara luar, tidak putus begitu saja, di mana Jepang masih berinteraksi dengan beberapa negara yang dalam melakukan hubungan dengan Jepang tanpa membawa-bawa penyebaran agama Kristen. Untuk hal tersebut pemerintahan Tokugawa memberlakukan peraturan *fumie* (yang pernah digunakan untuk menyelidiki dan memilah penganut Kristen di antara penduduk Nagasaki pada tahun 1629) bagi bangsa asing (Barat) yang ingin melakukan hubungan dagang dengan Jepang setelah penutupan negeri Jepang di tahun 1639.

Arti kata *fumie* sebenarnya adalah ‘menginjak gambar’, namun dikarenakan gambar-gambar yang diinjak adalah gambar-gambar dari orang-orang suci agama Kristen seperti Yesus atau pun Bunda Maria, maka tindakan *fumie* tersebut dilakukan untuk membuktikan bahwa orang tersebut bukanlah penganut agama Kristen atau tidak terlibat dalam kegiatan misionaris (untuk bangsa Barat),

Dengan diberlakukannya peraturan *fumie*, akhirnya satu-satunya bangsa Eropa yang diizinkan berdagang dengan Jepang hanyalah serikat dagang dari Belanda yang mayoritas beragama Protestan dan memisahkan antara urusan agama dengan urusan bisnis. Namun demikian, kantor dagangnya hanya diizinkan berada di wilayah pinggir, tepatnya di Pulau Dejima Prefektur Nagasaki. Selain itu, meskipun serikat dagang Belanda mendapatkan izin untuk memasuki wilayah Jepang, tetapi pemerintah Jepang tetap melakukan pengawasan yang sangat ketat terhadap keberadaan orang-orang Belanda.

Bangsa Belanda tidak diizinkan sama sekali untuk keluar dari wilayah Dejima. Namun demikian, ada beberapa saat di mana orang-orang Belanda dapat pergi ke wilayah Jepang lainnya, yaitu ketika pemerintah Jepang memberlakukan kebijakan dalam satu tahun sekali perwakilan dari serikat

dagang Belanda harus melakukan kunjungan ke pusat pemerintahan Jepang tempat *Shogun* berada yaitu di Edo untuk melakukan *fumie* sebagai bukti ketidakterlibatan mereka dalam kegiatan penyebaran agama Kristen (hal ini hanya berlangsung sampai pelabuhan dan kantor dagang Belanda resmi didirikan di pulau Dejima pada 1656) dan untuk mengontrol kegiatan-kegiatan perdagangan Belanda serta menyerahkan upeti dan hadiah tahunan untuk *Shogun* dari perwakilan pemerintah Belanda (Surajaya, 1993).

Pengontrolan Jepang terhadap Belanda sebagaimana disebutkan di atas, dimaksudkan untuk mengimbangi keterasingan dari dunia luar, agar tidak tertinggal dalam bidang ilmu pengetahuan. Caranya masyarakat Jepang tetap mempelajari ilmu – ilmu sains, terutama yang berasal dari Belanda, di mana melalui Pulau Dezima, pemerintahan Jepang memaksa kapal-kapal V.O.C. (perusahaan dagang milik Belanda) yang singgah di pulau tersebut untuk memberikan informasi mengenai perkembangan yang terjadi. Kapal-kapal tersebut kebanyakan berlayar dari Eropa menuju Batavia (sekarang bernama Jakarta). Dengan memperoleh informasi dari situ, Jepang tidak akan tertinggal jika terjadi perkembangan ilmu pengetahuan yang berada di Eropa. Hal yang sama juga terjadi sebaliknya, ketika kapal V.O.C. tersebut berangkat dari Batavia ke Eropa, maka kapal tersebut biasanya terlebih dahulu singgah di Pulau Dezima (Surajaya, 1993).

Kemudian ketika singgah di Pulau Dezima, awak kapal Belanda wajib memberikan segala informasi yang ia ketahui. Melalui ilmu Belanda ini banyak mengubah pola pikir orang Jepang menjadi orang yang rasional seperti pemikiran orang – orang Eropa. Dapat dikatakan bahwa masa *Sakoku* adalah masa Jepang menjadi kepompong, di mana masyarakat Jepang banyak belajar memahami bangsanya sendiri dan bangsa lain.

2.2.5 Dampak Kebijakan Politik *Sakoku*

Dampak Politik *Sakoku* di antaranya Jepang mempunyai kesempatan yang besar untuk memperbaiki pola pikir masyarakatnya. Dapat dikatakan pada masa *Sakoku* adalah masa Jepang banyak belajar memahami bangsanya sendiri dan bangsa lain. Kebijakan ini juga dapat mencegah Jepang dari perang-perang besar. Kemudian berhasil membangun Jepang dengan identitas masyarakat *feodal* yang kuat sebagai identitas masyarakat Jepang. Selain itu, telah membawa kebudayaan Jepang mengalami proses kematangan serta menghasilkan kondisi yang kondusif untuk membangun nasionalisme masyarakat. Masyarakat Jepang yang dulunya awam akan nasionalisme berkembang menjadi masyarakat Jepang yang terlalu membanggakan negaranya sendiri. Rasa nasionalisme bangsa Jepang merupakan dampak positif karena dengan adanya rasa nasionalisme, Jepang termotivasi untuk memajukan dan menjaga nama baik negaranya.

Ada pun proses kematangan dalam hal budaya, di mana budaya-budaya asli Jepang mulai bangkit, seperti *Kabuki*, *Geisha*, dan sebagainya. Kesusastraan pun dibina kembali. Kebangkitan ini terjadi pula pada kepercayaan asli mereka, *Shinto*. Selain itu, Jepang juga mengembangkan budaya original dan unik dalam seni (*ikebana*, *origami*), kerajinan tangan (pahatan, tembikar, persembahan (boneka *bunraku*, tarian tradisional, *kabuki*, *noh*, *rakugo*), dan tradisi (permainan Jepang, *onsen*, upacara minum teh, taman Jepang), serta makanan Jepang. Masa *Sakoku* ini juga ternyata berhasil meningkatkan aktifitas pertanian, perdagangan. Namun demikian, seiring berkembangnya sejarah pada masa kebijakan Politik *Sakoku* di Jepang yang berhasil mengembangkan kebudayaannya, negara di luar Jepang telah banyak meninggalkan Jepang dalam hal ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi karena Informasi tentang perkembangan itu tidak diketahui oleh Jepang. Dikatakan bahwa Jepang hanya fokus di dalam negeri saja, tidak melihat perkembangan di luar

Jepang. Akibatnya bahwa Jepang tertinggal dalam berbagai hal dari bangsa Barat (Surajaya, 1993).

Ada dua pendapat umum yang saling berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan Politik *Sakoku*, yaitu: Pendapat pertama, yang menyatakan bahwa Politik *Sakoku* selama lebih dari 200 tahun ternyata telah berhasil membangun Jepang dengan identitas masyarakat feodal yang kuat. Politik *Sakoku* ini membuat kebudayaan Jepang mengalami proses kematangan. Pendapat kedua, Politik *Sakoku* ini membuat Jepang mengalami ketertinggalan dari bangsa Barat. Ketika bangsa Barat telah menjadi bangsa yang maju dalam bidang industrialisasi, Jepang masih menjadi negara Feodal yang terbelakang (Surajaya, 1993)

2.3 Kebijakan Politik *Sakoku* Berakhir (Kaikoku)

Selain Jepang mengalami ketertinggalan dari bangsa Barat, Selama Jepang menjalankan Politik *Sakokunya*, di luar Jepang bermunculan tekanan agar Jepang kembali membuka diri dan menjalin hubungan dagang dengan negara asing yaitu negara-negara Barat. Hal ini karena meskipun negara - negara Barat telah menjadi negara maju ketika Jepang masih dalam kebijakannya menutup negara, tetapi bangsa Barat ingin meningkatkan perdagangannya ke luar negeri. Untuk itu bangsa Barat memerlukan Jepang untuk lalu lintas perdagangannya, sehingga muncul tekanan agar Jepang kembali membuka diri dan menjalin hubungan dagang dengan negara asing. Saat itu, beberapa negara asing tidak pernah berhasil membujuk Jepang untuk membuka negaranya, Namun dengan mengacu kegagalan yang dialami negara – negara yang menuntut Jepang dibuka, Amerika datang ke Jepang dengan persiapan yang matang dan menonjolkan keberhasilannya telah menjadi lebih maju. Caranya Amerika datang dengan kapal yang sudah modern tepatnya pada tahun 1853 (Surajaya, 1993).

Amerika datang ke Jepang dengan mengutus Matthew Perry (Komandan Armada Angkatan Laut Amerika Serikat) dengan membawa 4 buah kapal perang. Perry membawa surat perjanjian yang dibuat dalam 3 bahasa (Inggris, Belanda

dan Cina) dari Presiden Amerika yang isinya ingin membuka hubungan dagang dengan Jepang dan agar Jepang membuka pelabuhannya untuk bangsa asing, namun Jepang sempat mengelak. Baru ketika Perry kembali datang dengan kapal-kapal perangnya pada 1854, kali ini Jepang tidak dapat mengelak lagi, karena menghadapi Amerika dengan membawa kapal perang yang lebih modern lagi, sehingga pada akhirnya *bakufu* menandatangani perjanjian persahabatan Amerika – Jepang yang disebut *Nichibei Washin Jouyaku*. Isi dari perjanjian ini yaitu kapal – kapal Amerika diperbolehkan untuk berlabuh di dua pelabuhan yaitu pelabuhan Shimoda di Provinsi Shizuoka dan pelabuhan Hakodate di Hokkaidou. Tujuan dari perjanjian ini agar kapal – kapal Amerika dapat mengisi bahan bakar, air, dan makanan, dalam pelayarannya terutama dari Kanton di China ke Amerika (Surajaya, 1993).

Kemudian pada 1856 Ii Naosuke yang merupakan salah satu pembela *bakufu* menandatangani perjanjian persahabatan dan perdagangan dengan Amerika (*Nichibei Shuko Tsusho Jouyaku*). Perjanjian ini berisi perjanjian, di mana Jepang akan membuka lima pelabuhannya sebagai pelabuhan perdagangan yaitu, Kanagawa di Yokohama, Hakodate, Nagasaki, Niigata dan Hyogo di Kobe. Perjanjian seperti ini juga ditandatangani oleh Inggris, Perancis, Rusia, dan Belanda. Rusia, Inggris dan Perancis dan Belanda pun berhasil melakukan aktifitas di pelabuhan-pelabuhan Jepang dengan membawa produk asing (Surajaya, 1993).

Masuknya bangsa asing yang membawa produk asing membuat pedagang lokal Jepang rugi dan bangkrut. Pihak yang merasa dirugikan berfikir bahwa pemerintah Tokugawa tidak becus dalam menjaga negara. Pemerintahan *Tokugawa* pun kehilangan wibawanya dan dianggap telah mengingkari janji kepada rakyat Jepang. Semakin banyak orang asing yang datang ke Jepang, maka dianggap membawa pengaruh yang negatif bagi Jepang. Lalu muncullah kelompok anti pemerintahan dan anti asing di provinsi Satsuma dan provinsi Choshu, namun kedua provinsi ini menjadi sasaran pengeboman oleh kapal-kapal perang Amerika Serikat dan Eropa (Surajaya, 1993).

Karena serangan bombardir Amerika Serikat dan Eropa kelompok – kelompok di provinsi Satsuma dan Choshu menyadari bahwa negara Barat terlalu kuat untuk dikalahkan olehnya, maka mereka pun menyerah dan menyadari potensi dari pihak musuh. Mereka mulai menjalin kontak dengan Amerika Serikat dan Inggris supaya kedua negara tersebut bersedia untuk membantu memodernisasi dan menggulingkan pemerintahan lewat jalur militer. Kegiatan modernisasi pemerintahan ini pun berbuah manis, ketika terjadi perang antara pasukan pro pemerintah *Tokugawa* melawan pasukan pro kekaisaran. Pasukan pro *Tokugawa* memiliki keunggulan dalam jumlah personil, namun mereka tidak memiliki stok senjata modern, sedangkan pasukan pro kekaisaran dilengkapi dengan persenjataan paling mutakhir. Akibatnya pemerintahan Tokugawa kalah dan mundur, sehingga pemerintahan berubah menjadi kekaisaran. Disinilah era *Tokugawa* berubah menjadi *Meiji*.

